

Media Massa, Demokratisasi dan Etika Sosial

Audience, Viewing Practice and Female Spectatorship in Contemporary Indonesia Rachmah Ida

> Potret Kekerasan Gender dalam Sinetron Komedi di Televisi Liestianingsih Dwi Dayanti

Politik Media, Demokrasi dan Media Politik S. Aminah

Masalah Organisasi Evaluasi Pembangunan Gatot Pramuka

Cerminan Etika dalam Hubungan Antar-Manusia: Analisis pada Beberapa Ornamen Candi Sukuh Djoko Adi Prasetyo

Etika Sosial dalam Novel Kawin Kontrak: Analisis Karya Saifur Rohman Heru Supriyadi

Resensi Buku
Formasi Dan Struktur Gerakan Sosial Petani:
Studi Kasus Reklaiming/Penjarahan atas Tanah PTPN XII
(Persero) Kalibakar Malang Selatan
Doddy Sumbodo Singgih

MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK

Diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, sebagai terbitan berkala tiga bulan sekali yang menyajikan tulisan-tulisan untuk lebih mempopulerkan ilmu kemasyarakatan ke tengah khalayak peminat dan untuk membuka forum belajar-mengajar yang lebih efektif

Pemimpin Umum Hotman M. Siahaan

Wakil Pemimpin Umum I. Basis Susilo

> Penanggungjawab Kris Nugroho

Dewan Redaksi

Soetandyo Wignjosoebroto (Unair)
Ramlan Surbakti (Unair)
Daniel Theodore Sparringa (Unair)
Mohtar Mas'oed (UGM)
Ashadi Siregar (UGM)
Herudjati Purwoko (Undip)
Edy Suhardono (Ubaya)

Pemimpin Redaksi Doddy S. Singgih

Sekretaris Redaksi Harijono

Redaksi Pelaksana Bagong Suyanto Yuyun Wahyu Izzati Helmy Prasetyo

Produksi dan Pemasaran Herwanto

STT No. 841/SK/Ditjen PPG/STT/1981 ISSN 0216-2407

Alamat Redaksi: FISIP Unair Jl. Airlangga 4-6 Surabaya 60286, Indonesia Telepon: 031-5034015, Fax: 031-5012442

e-mail: fisip@unair.ac.id

Pengantar Redaksi

Tidak dapat disangkal lagi bahwa peran dan pengaruh media massa baik media elektronik maupun cetak sangat besar hingga mampu menyihir penikmatnya. Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, ibu-ibu rumah tangga, serta pria dan wanita tidak luput dari sasaran pengaruh media massa. Tidak hanya itu, ternyata kehadiran berbagai tayangan yang diliput oleh media massa telah memiliki segmentasi peminat yang pada akhirnya bila dipetakan sebagai contoh penikmat sinetron, telenovela maupun tayangan sejenis adalah kaum wanita, terutama ibu-ibu.

Salah satu contoh media yang dikupas adalah televisi. Televisi merupakan salah satu kotak ajaib yang mampu membuat penonton tertawa, menangis, haru bahkan bisa saja sampai menjurus pada pembunuhan. Pendek kata media televisi merupakan salah satu media pembelajaran yang efektif dan efisien, hal ini cocok sekali karena budaya masyarakat Indonesia masih dalam tataran budaya bertutur belum dalam taraf budaya baca. Apalagi media televisi memiliki efek keserempakan, artinya dengan sekali tayang pesan akan dapat ditangkap oleh ratusan bahkan ribuan pemirsa dalam waktu sekejab, fenomena ini baik sekali bila digunakan oleh para penjual iklan. Diharapkan dengan tayangan iklan akan mampu meraup keuntungan yang dapat berlipat ganda.

Tentu saja efek tayangan media televisi maupun media yang lain ada sisi negatif maupun positifnya. Sisi positif cukup banyak, namun yang hendak diketengahkan dari berbagai artikel yang telah dihimpun redaksi adalah selain sisi positif adalah sisi negatif terutama tayangan yang bersifat kekerasan terutama kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh institusi media. Berbagai bentuk kekerasan gender dapat dijumpai dalam bentuk tayangan iklan, sinetron, berita, komik, film dan sebagainya. Kekerasan ini dalam dalam bentuk penggambaran yang tidak adil pada kelompok perempuan.

Pada saat yang bersamaan peran media massa menjadi perpanjangan tangan kepentingan penguasa. Dengan menggunakan bahasa politik yang bermakna ganda, misalnya untuk tujuan penghalusan maupun untuk kepentingan memperdayakan warganegara, keduanya adalah bagian dari politik hegemoni sebagai syarat untuk mengukuhkan kuasa penguasa.

Dari gambaran di atas, redaksi pada tema edisi No. 3 bermaksud mengupas permasalahan seputar *Media Massa*, *Demokratisasi dan Etika Sosial* selain terdapat berbagai tulisan di luar topik utama. Beberapa topik utama antara lain: Audience, Viewing Practice and Female Spectatorship in Contemporary Indonesia diuraikan oleh Rachmah Ida; Liestianingsih Dwi Dayanti mencoba untuk menjelaskan tentang Potret Kekerasan Gender dalam Sinetron Komedi di Televisi; dari segi politik Siti Aminah memaparkan

Topik Utama Edisi No. 4 (Oktober) 2006: Evolusi Manusia dan Kebudayaan

Politik Media, Demokrasi dan Media Politik; kajian dari Administrasi Negara tentang Masalah Organisasi Evaluasi Pembangunan dipaparkan oleh Gatot Pramuka; Cerminan Etika dalam Hubungan Antar-Manusia: Analisis pada Beberapa Ornamen Candi Sukuh oleh Djoko Adi Prasetyo; dari Sastra Etika Sosial dalam Novel Kawin Kontrak: Analisis Karya Saifur Rohman oleh Heru Supriyadi; serta resensi buku tentang Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani: Studi Kasus Reklaiming/Penjarahan atas Tanah PTPN XII (Persero) Kalibakar Malang Selatan oleh Doddy Sumbodo Singgih.

Harapan redaksi semoga keberadaan Masyarakat, Kebudayaan dan Politik ini dapat memberikan alternatif pemecahan masalah sekaligus menjadi media interaksi yang dapat menjembatani para ahli, ilmuwan sosial, pemerhati masalah sosial-politik dan berbagai pihak terkait dalam mengkomunikasikan gagasan serta ide demi perbaikan proses pembangunan serta perkembangan masyarakat yang senantiasa berubah.

baca. Apalasi media televisi asmiliki efek kesecamesian, artinya dengan sekali tayang

Redaksi Redaksi karensi kiales koono ini lad melaita nah titilata anav amalaladaran sib Redaksi

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi

iii

Daftar Isi

V

Audience, Viewing Practice and Female Spectatorship in Contemporary Indonesia

Rachmah Ida

1

Potret Kekerasan Gender dalam Sinetron Komedi di Televisi

Liestianingsih Dwi Dayanti

15

Politik Media, Demokrasi dan Media Politik

S. Aminah

35

Masalah Organisasi Evaluasi Pembangunan

Gatot Pramuka

47

Cerminan Etika dalam Hubungan Antar-manusia: Analisis pada Beberapa Ornamen Candi Sukuh

Djoko Adi Prasetyo

59

Etika Sosial dalam Novel Kawin Kontrak: Analisis Karya Saifur Rohman

Heru Supriyadi

69

Resensi Buku

Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani: Studi Kasus Reklaiming/ Penjarahan atas Tanah PTPN XII (Persero) Kalibakar Malang Selatan

Doddy Sumbodo Singgih

79

Resensi Buku

FORMASI DAN STRUKTUR GERAKAN SOSIAL PETANI

Studi Kasus Reklaiming/Penjarahan atas Tanah PTPN XII (Persero) Kalibakar Malang Selatan

Penulis : Dr. Wahyudi
Penerbit : UMM Press, Malang
Cetakan : Pertama, November 2005
Tebal : xxiii + 293 halaman

Peresensi: Doddy Sumbodo Singgih Dosen Jurusan Sosiologi FISIP dan Pascasarjana Unair, Surabaya

uku yang ditulis oleh Dr. Wahyudi ini merupakan disertasinya (S3) yang berhasil dipertahankan di Program Pascasarjana Universitas Indonesia, pada tahun 2005 lalu. Sistematika buku ini terdiri dari 8 (delapan) Bab, yaitu: Bab I menjelaskan tentang deskripsi latarbelakang penelitian, termasuk juga penjelasan tentang pemetaan teori yang terkait dengan gerakan sosial, perilaku kolektif, aksi kolektif, jaringan sosial dan beberapa studi terdahulu tentang perlawanan kaum tani di Indonesia. Bab II buku ini menjelaskan tentang deskripsi lokasi penelitian — yang oleh penulis disebut dengan the big picture of Kalibakar. Sedangkan Bab III, IV, V dan VI menyajikan tentang temuan data lapangan. Jika dicermati, inti buku ini sebenarnya terletak pada Bab IV di mana pada Bab ini disajikan tentang temuan data lapangan gerakan sosial petani di wilayah

Kalibakar Malang Selatan, yang terjadi pada tahun 1992 - 2005. Menurut kategori sosiologis, tahun 1992 - 1993 disebut sebagai Era Jaringan Terbatas, tahun 1996 - 1997 disebut sebagai Era Perluasan Jaringan, tahun 1998 - 2000 disebut sebagai Era Puncak Jaringan dan tahun 2001 - 2005 disebut sebagai sebagai Deklinasi Jaringan (hlm. 1-2). Oleh penulis buku ini, penjelasan gerakan sosial petani ini diteruskan pada Bab V, di mana gerakan tersebut berada di Era Puncak Jaringan.

Ditinjau secara substansial — terutama jika kita membaca dan mencermati buku ini — tampak betapa sistematisnya penulis buku ini dalam mengemukakan gagasan teoritis dan/atau temuan-temuan data lapangannya. Misalnya, sejak halaman awal, penulis buku ini telah mengemukakan tentang konsep gerakan petani yang digunakan dalam penelitiannya. Menurut penulis buku

ini, gerakan petani adalah gerakan yang dilakukan oleh para petani dari 6 (enam) desa (Simojayan, Tlogosari, Tirtoyudo, Kepatihan, Baturetno, dan Bumirejo) dalam memperjuangkan pemberlakuan program land reform atas tanah eks HGU perkebunan Belanda di Kalibakar (hlm. 1). Lebih jauh daripada itu, oleh karena gerakan petani ini tidak membuahkan hasil ketika ditempuh melalui perjuangan prosedural, maka para petani memilih strategi reklaiming/penjarahan sebagai alternatif terakhir untuk mendapatkan tanah perjuangan nenek moyang mereka. Secara konseptual, penulis buku ini menggunakan istilah reklaiming sebagai istilah yang dimiliki petani, karena mereka menganggap tindakannya sebagai upaya untuk mengambil kembali hak milik atas tanah perjuangan nenek moyang mereka. Sedangkan istilah penjarahan adalah istilah yang dimiliki perkebunan, karena pengelolaan atas aset perkebunan tersebut didasarkan atas dokumen sertifikat HGU yang diterbitkan secara resmi oleh pemerintah dan baru akan berakhir pada tahun 2013 nanti (hlm. 1).

Gerakan petani tersebut sebenarnya telah dimulai sejak zaman pasca pendudukan zaman Jepang, kemudian berlanjut pada masa agresi Belanda ke-?, era pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, era reformasi dan bahkan sampai detik ini. Penelitian ini hanya terfokus pada kasus gerakan petani Kalibakar yang terjadi pada tahun 1992 -2005. Oleh penulis buku ini, era perjuangan petani ini dibagi secara sosiologis ke dalam 4 (empat) era. Pertama, Era Jaringan Terbatas (1992 - 1993). Kedua, Era Perluasan Jaringan 1996 - 1997. Ketiga, Era Puncak Jaringan (1998 - 2000). Dan keempat, Era Deklinasi Perjuangan (2001

- 2005). Sebagai sebuah fenomena gerakan sosial, gerakan reklaiming/penjarahan yang dilakukan oleh petani di Kalibakar ini sangat menarik untuk dikaji secara ilmiah. Menurut penulis buku ini, kasus Kalibakar ini tidak hanya disebabkan oleh adanya kemauan petani dan kondusifitas struktur sosial saja, tetapi juga oleh aspek-aspek penting lainnya, misalnya iklim politik dan dukungan networking yang ketika itu berada di pihak petani (hlm. 3).

Dalam konteks kasus gerakan petani di Kalibakar, penulis buku ini menemukan data bahwa dalam setiap peristiwa gerakan reklaiming/penjarahan ternyata orientasi para aktornya bukan hanya norm oriented saja, tetapi diantara mereka juga ada yang berorientasi pada sumber-sumber yang ada dalam peristiwa itu (resource oriented). Hal ini tampak dengan adanya interest para aktor terhadap tanah (land property) dan kekuasaan sosial politik (social and political power) (hlm. 5). Oleh karena itu, ada 2 (dua) pertanyaan penelitian yang dijawab oleh penulis buku ini. Pertama, bagaimana the important determinants perilaku kolektif saling memberi kontribusi atas masing-masing nilainya dalam proses formasi gerakan sosial petani di Kalibakar? Dan kedua, bagaimana proses terjadinya struktur gerakan sosial petani Kalibakar itu? (hlm. 44).

Dengan menggunakan metode penelitian studi kasus yang bersifat kualitatif, penulis buku ini menjawab kedua pertanyaan penelitian tersebut. Subyek penelitiannya ditentukan secara purposif (hlm. 47), yang terdiri dari kalangan petani (12 orang), kalangan perkebunan (7 orang), kalangan LSM (5 orang), kalangan birokrasi (6 orang), kalangan institusi penegakan hukum dan keamanan (4 or-

ang), dan kalangan institusi keagamaan (3 orang). Dengan menggunakan kerangka analisis data sebagaimana yang dikemukakan oleh Strauss dan Gobin, yaitu melakukan tahap open coding, tahap axial coding, tahap selective coding, dan tahap pencermatan temuan lapangan (hlm. 520), maka diperoleh kesimpulan penelitian sebagai berikut:

- Formasi gerakan sosial petani di Kalibakar ditentukan oleh the important determinants perilaku kolektif, yaitu:
 - Kondusifitas struktural. Secara umum, kondisi ini berupa: (a) meningkatnya kontak dan komunikasi dengan pihak-pihak di luar petani, sehingga melahirkan jaringan dukungan gerakan, (b) struktur kekerabatan yang patrilinial, (c) sistem sosial yang paternalistik, (d) struktur tingkat pendidikan penduduk yang rata-rata hanya tamat SD/sederajat dan SMP/ sederajat, (e) struktur matapencaharian penduduk yang mayoritas petani dan buruh tani, (f) struktur politik yang tersentral pada pemimpin formal desa, (g) lingkungan alam perkebunan dan tempat tinggal penduduk yang terpencar-pencar, dan (h) sistem ketetanggaan masyarakat yang social oriented berhadapan dengan sistem perkebunan business atau profit oriented. Sedangkan secara khusus, kondisi ini dipengaruhi oleh adanya dukungan dari ormas yang berafiliasi pada partai politik yang besar, adanya aktor yang berhasil menggalang jaringan dengan pemegang kekuasaan lokal dan pusat, gagalnya proses sertifikasi

tanah, bergulirnya era reformasi, terjadinya *vacuum of power*, dan menghilangnya dukungan jaringan terhadap petani.

- Ketegangan struktural (tidak terselesaikannya persoalan land dispute antara petani dan perkebunan).
- Petumbuhan dan penyebaran "kepercayaan umum" (adanya kepercayaan di kalangan petani bahwa tanah eks perkebunan Belanda itu adalah hak sah dari petani).
- Faktor pemercepat (adanya dukungan dari ormas, disetujuinya ide-ide P2RB oleh pemerintah desa, adanya pencurian pohonpohon lindung di areal hutan, adanya kegagalan proses sertifikasi tanah yang dijanjikan pemerintah, dan lahirnya era reformasi).
- Mobilisasi motivasi terhadap para partisipan untuk turut serta melakukan gerakan reklaiming/ penjarahan (adanya ajakan kepada para petani dan keluarganya yang mendukung program-program P2RB untuk melakukan reklaiming/penjarahan terhadap areal hutan).
- Kontrol sosial (adanya kontrol dari agen kontrol sosial, misalnya pihak keamanan perkebunan, kepolisian, tentara dan dari pihak masyarakat itu sendiri yang tidak setuju dengan reklaiming/penjarahan).
- Konsistensi komitmen dukungan jaringan (adanya dukungan dari ormas yang memiliki afiliasi politik dengan partai politik yang besar, adanya dukungan dari para aktor yang pernah menjadi pelaku sejarah

redistribusi tanah pada zaman agresi Belandan ke-2, dan adanya dukungan para aktor lain, misalnya mereka yang berasal dari organisasi politik maupun organisasi non politik).

- Organisasi (adanya peran dari pemerintah desa yang sangat mendukung gerakan petani, sehingga petani memiliki organisasi petani sendiri).
- Struktur gerakan sosial petani Kalibakar selalu berubah-ubah atau fluid sejak tahun 1993 hingga tahun 2005 ini.
- Struktur jaringan gerakan petani Kalibakar itu terbentuk — disamping karena adanya kondusifitas sistem sosial politik baik di tingkat lokal maupun nasional — juga dipengaruhi oleh adanya para aktor yang memiliki kesamaan nilai-nilai subyektif, seperti ideologi dan pertimbangan untung-rugi, serta kemampuan dalam mengembangkan pola komunikasi yang efektif, khususnya dari pihak petani yang memerlukan dukungan.
- Komitmen (yaitu adanya jaringan yang bukan hanya atas pertimbangan untung-rugi, rasionalitas dan tujuan materiil saja, tetapi juga adanya pertimbangan lain, misalnya ideologi, emosi, kondisi makro kondusifitas sistem sosial politik).
- Lemahnya bargaining position di kalangan petani.
- Adanya keberadaan aktor yang dalam gerakan itu tidak selalu dalam rangka mencapai tujuan bersama, tetapi juga juga dalam rangka mencapai tujuannya masing-masing.
- Adanya perbedaan orientasi dalam gerakan di kalangan para aktor.

Misalnya, para pemimpin gerakan, LSM dan mahasiswa lebih berorientasi pada norma-norma idealis. Sedangkan para petani biasa, para *free riders* dan para pemegang kekuasaan lebih berorientasi pada *resources* atau *interest* ekonomi dan politik.

Akhirnya, seberapa kecermatan kita dalam membaca buku ini, tampaknya kita harus mencermatinya dalam 3 (hal) yang utama. Pertama, tampaknya penulis buku ini tidak menjawab secara tegas (to the poin) atas 2 (dua) pertanyaan penelitian yang telah diajukan (hlm. 44), di mana jawaban pertanyaan tersebut seharusnya tertuju pada bagaimana the important determinants saling memberi kontribusi dalam proses formasi gerakan petani. Kata kuncinya di sisi adalah "kontribusi", yang tampaknya justru diabaikan oleh penulis buku ini. Padahal iika kata kunci "kontribusi" ini digunakan secara konsisten - baik dengan menggunakan metodologi kualitatif maupun kuantitatif — tentu akan lebih memberikan makna terhadap hasil penelitian ini. Lebih jauh daripada itu, jawaban atas pertanyaan kedua pun juga tidak terjawab secara signifikan, di mana penulis buku ini mempertanyakan bagaimana proses terjadinya struktur gerakan petani. Kata kunci dalam pertanyaan penelitian yang kedua ini adalah "proses", yaitu proses terjadinya struktur gerakan sosial petani. Jika dicermati, jawaban atas pertanyaan kedua itu pun juga tidak terjawab. Sejauh-jauhnya - seandainya kita menganggap bahwa pertanyaan penelitian ini terjawab maka jawabannya hanyalah keberhasilan penulis buku ini dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus Kalibakar. Jika kita mau

membaca berbagai hasil penelitian, sebenarnya faktor-faktor tersebut telah berhasil diidentifikasi sejak lama oleh para peneliti.

Kedua, meski cukup banyak teori yang digunakan untuk menjelaskan kasus Kalibakar ini, tetapi tampaknya penulis buku ini kurang tanggap bahwa penjelasan teoritis dan/atau empirisnya terhadap kasus ini bukanlah hal yang baru. Dengan kata lain, penelitian yang hasilnya ditulis dalam buku ini tampaknya tidak menjelaskan temuan lain, atas krusialnya kasus Kalibakar ini. Dan ketiga, dari segi metodologis, tampaknya penulis buku ini tidak konsisten menggunakan acuan metodologi dari Strauss dan Gobin, tetapi ia hanya melakukan penelitian kualitatif sederhana, yaitu melakukan pengumpulan data kualitatif dan kemudian menganalisisnya dengan menggunakan model narasi-narasi secara kualitatif. Ketidakkonsistenan itu tampak dari misalnya — dari penentuan subyek penelitiannya, baik dari segi kategori maupun jumlahnya (hlm. 47-50). Sebagai sebuah hasil penelitian untuk disertasi S3. setidak-tidaknya ketiga hal tersebut di atas

bisa terpenuhi. Misalnya, harus bisa menjawab pertanyaan penelitian secara tegas dan lugas, dan bahkan sangat diharapkan kompleksitas keruwetan jawaban itu bisa terurai dengan jelas. Selain itu, dalam penelitian ini pun, seharusnya ada keberanian untuk menguji teorisasi yang selama ini "dibenarkan" secara ilmiah. Dengan kata lain, seharusnya penulis buku ini bisa menemukan anomali-anomali teoritis. Dan secara metodologis, seharusnya dalam penelitian untuk disertasi digunakan metodologi yang tidak konvensional, yang pada umumnya metodologi ini hanya untuk "menjawab" pertanyaan penelitian saja, dan bukan diarahkan untuk "mengatasi" masalah.

Apa pun penilaian kita terhadap buku tulisan Dr. Wahyudi ini — setidaktidaknya — kini khazanah hasil penelitian tentang perlawanan kaum tani di Indonesia telah bertambah satu. Dalam konteks ini, hasil penelitian bukanlah sebuah akhir dari perjalanan penjelajahan seorang akademisi, tetapi justru sebuah awal dari upaya pengembangan keilmuan sang akademisi tersebut.